

**STUDI TENTANG PENGAWASAN LURAH DALAM
PELAKSANAAN ADMINISTRASI UMUM
DI KANTOR KELURAHAN PELITA
KECAMATAN SAMARINDA ILIR**

Rina Muliany

**eJournal Administrasi Negara
Volume 4, Nomor 2, 2014**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Studi tentang Pengawasan Lurah dalam Pelaksanaan Administrasi Umum di Kantor Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir

Pengarang : Rina Muliany

NIM : 0702015015

Program Studi : Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

Telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Negara Fisip Unmul.

Samarinda, 20 Agustus 2014

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof.Dr.H.Adam Idris, M.Si
NIP. 19600114 198803 1003

Drs.Endang Erawan, M.Si
NIP. 19550820 198403 1001

Bagian di bawah ini
DIISI OLEH PROGRAM STUDI

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan : eJournal Administrasi Negara	KETUA PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
Volume :	
Nomor :	
Tahun : 2014	
Halaman :	<u>Drs. M. Z. Arifin, M. Si.</u> NIP. 19570606 198203 1 001

STUDI TENTANG PENGAWASAN LURAH DALAM PELAKSANAAN ADMINISTRASI UMUM DI KANTOR KELURAHAN PELITA KECAMATAN SAMARINDA ILIR

Abstrak

Rina Mulianny¹

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana pengawasan lurah dalam pelaksanaan administrasi umum di kantor kelurahan pelita kecamatan samarinda ilir. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan keadaan di lapangan dengan data yang diperoleh dari hasil penelitian.

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan situasi dan kondisi. Teknik pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan, penelitian lapangan seperti observasi, wawancara, dokumentasi dan melalui internet sedangkan analisis data penulis menggunakan data model interaktif yang dikembangkan oleh milles dan huberman.

Dari hasil penelitian dapat di ketahui bahwa pengawasan lurah dalam pelaksanaan administrasi umum pada kantor kelurahan pelita kecamatan samarinda ilir cukup baik, namun masih saja terdapat kendala atau hambatan dalam pelaksanaannya, masih perlu adanya perbaikan dan peningkatan pengawasan yang dilakukan oleh lurah terhadap staf pegawainya agar kualitas dari pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pada masa yang akan datang menjadi lebih baik dan meningkat.

Kata Kunci : Pengawasan Lurah

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman. Email : rina.mulianny@yahoo.com

Pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan perwujudan tujuan nasional bangsa Indonesia pada intinya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang – undang Dasar 1945. Pembangunan nasional yang dilaksanakan pada hakekatnya mencakup semua aspek kehidupan manusia yang dilakukan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan serta menyeluruh keseluruh pelosok tanah air. Agar pembangunan nasional sesuai dengan sasaran, maka pelaksanaannya dapat diarahkan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kegiatan pembangunannya sendiri. Pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional mencakup seluruh segi kehidupan masyarakat, penyelenggaraan dilakukan menyeluruh sampai ke pelosok daerah sesuai dengan kondisi daerah masing-masing, dengan kata lain bahwa Negara memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi.

Di dalam UU No. 32 Tahun 2004 mengatur tentang pemerintahan daerah yang di dalamnya menjelaskan mengenai pengawasan yaitu pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan yang dianut menurut Undang-undang No.32 tahun 2004, meliputi dua bentuk pengawasan yakni pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Dalam konsep otonomi daerah pelaksanaan pengawasan tidak boleh mengakibatkan pengurangan atau penggrogotan terhadap nilai-nilai yang berlaku dan terkandung dalam dasar-dasar desentralisasi yaitu kebebasan dan inisiatif daerah dalam berprakarsa. Tanpa pengawasan yang tepat maka disinyalir akan dapat mengakibatkan terancamnya brandol kesatuan NKRI.

Salah satu dari lima fungsi dasar manajemen adalah control atau pengawasan yang berfungsi membantu memastikan apakah aktifitas yang dilakukan pegawai administrasi sesuai dengan hasil yang diinginkan. Selain itu, fungsi ini juga dapat digunakan untuk memfasilitasi bagaimana melakukan perbaikan terhadap hal tersebut. Pengawasan adalah tanggung jawab pimpinan, tapi karena tidak mungkin pimpinan melakukan semuanya maka pengawasan dilimpahkan pada unit pengawasan. Tetapi dalam melakukan pengawasan pimpinan akan dibantu oleh beberapa manajer yang bertugas pada bidangnya masing-masing sehingga proses pengawasan dapat lebih efektif dan lebih efisien. Mulanya dan bahkan sementara pihak saat ini menganggap bahwa fungsi pengawasan itu tidak perlu, dilupakan, dan disalah artikan. Namun, dalam organisasi modern dan dalam perusahaan berstandar kompleks semakin disadari

pentingnya fungsi control itu yang sebenarnya bermaksud baik yaitu sebagai fungsi manajemen untuk menjamin bahwa apa yang ditetapkan sebagai tujuan organisasi dapat dicapai dengan semestinya.

Akan tetapi masalah pengawasan masih merupakan salah satu titik lemah dalam administrasi pemerintahan kelurahan kita. Dengan cara yang mungkin dapat dianggap tidak relevan, hubungan kerja diantara perangkat-perangkat pengawasan dewasa ini dapat digambarkan sebagai pengawasan yang terlambat, terutama bila kita memandangnya secara vertical. Pengawasan yang kurang dari pimpinan maupun dari pemerintah sehingga jalannya pelaksanaan administrasi terhambat. Apabila kita amati dengan seksama akan tampak jelas disana-sini belum adanya pengertian yang baik tentang pengawasan.

Setiap pimpinan dalam melaksanakan pengawasan harus mengetahui secara tepat obyek atau sarana yang sekaligus menjadi sasaran pengawasannya. Saat ini masih tampak gejala bahwa pada umumnya pimpinan sebagai atasan tidak mengetahui obyek dan sasaran pengawasan yang tepat untuk dilaksanakan, sehingga pengawasan tersebut masih kurang atau bahkan ada yang tidak dilaksanakan, meskipun tidak berarti pengawasan itu belum dilaksanakan.

Kurangnya pemahaman terhadap mekanisme dan pelaksanaan dari pengawasan itu sendiri dapat terjadi pada khalayak ramai, pada pihak-pihak yang diawasi, pada pejabat pimpinan atau atasan pengawas, bahkan ada kalanya masih terjadi pula pada kalangan petugas pengawasan itu sendiri meskipun hal ini sudah amat langka kejadiannya. Hal ini membawa konsekuensi atau akibat yang bermacam-macam yang pada umumnya kurang menguntungkan, lebih-lebih apabila kurangnya pengertian itu datang dari pihak pejabat pimpinan atau atasan pengawas, hal yang sedemikian itu jelas akan mengakibatkan perangkat pengawasan yang bersangkutan kurang dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Pengawasan administrasi mempunyai peranan penting untuk mencapai tujuan organisasi, namun pelaksanaannya tidak mudah. Pengawasan administrasi dapat dikatakan berhasil apabila memenuhi criteria, proses pengawasan telah memungkinkan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki individu dari pekerjaan dapat digunakan untuk memodifikasi tujuan organisasi. Terdapat dukungan dari manajemen puncak untuk melakukan pengawasan. Pengawasan akan sulit terlaksana tanpa dukungan dan komitmen dari manajemen puncak.

Dalam konteks permasalahan inilah pengawasan merupakan upaya dalam pelaksanaan administrasi dibidang kelurahan. Untuk itu kelurahan diharapkan dapat meningkatkan keefektifannya, baik dalam meningkatkan keberhasilan program pemerintah maupun dalam menggerakkan partisipasi masyarakat sebab

selain melaksanakan berbagai program yang diberikan dari atasannya, pemerintah ke warga juga dituntut untuk dapat memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang ada diwilayahnya dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan di Kelurahan Pelita, pengawasan tersebut belum dapat tercapai sepenuhnya, hal ini terbukti dari masih adanya aparatur kelurahan yang tidak menjalankan pelaksanaan administrasi umum dengan baik, dalam hal ini kurang memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik, seperti pengurusan surat-surat keterangan atau surat pengantar yang diperlukan masyarakat masih terlihat lambat, karena sering menunda-nunda penyelesaian urusan yang menjadi keperluan masyarakat dan tugas yang seharusnya dikerjakan sebagai abdi pemerintah, hal ini terjadi karena pengawasan yang ada di Kelurahan Pelita tidak efektif dan efisien, bahkan terkesan longgar dan tidak rutin dilaksanakan.

Disamping itu lemahnya pengembangan cara kerja dan tata kerja yang kurang taktis dan sistematis, hal ini terlihat dari sebagian aparat Kelurahan yang diberikan tugas oleh kepala kelurahan (Lurah) masih kurang biasa mengembangkan uraian dan tugas tersebut secara optimal, sehingga dalam menghadapi permasalahan selalu meminta petunjuk kerja terlebih dahulu tanpa adanya inisiatif atau tingkat kreatifitas rendah. Selain itu kurangnya disiplin pegawai juga merupakan masalah utama yang dihadapi masyarakat ketika berurusan di Kelurahan, karena saat masyarakat mengharapkan untuk mendapatkan pelayanan, sering terjadi pegawai atau aparat yang berkompeten/berkaitan tidak berada ditempat untuk melayani masyarakat yang memerlukan.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan pada Kantor Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir, maka penulis ingin mengetahui dan meneliti tentang **“Studi Tentang Pengawasan Lurah dalam pelaksanaan Administrasi Umum di Kantor Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir”**.

Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengawasan lurah dalam pelaksanaan administrasi umum di Kantor Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat pengawasan pelaksanaan administrasi umum tersebut?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengawasan lurah dalam pelaksanaan administrasi di lingkungan organisasi atau unit kerja masing-masing pada Kantor Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat implementasi dari pengawasan di Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir.

Manfaat Penelitian

1. Segi Ilmiah sebagai bahan informasi untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang pengawasan lurah terhadap pelaksanaan administrasi di lingkungan organisasi atau unit kerja
2. Segi Praktis sebagai bahan perbandingan bagi peneliti yang berminat dengan masalah ini, dan sebagai sumbangan pemikiran bagi pemerintah kelurahan pelita kota samarinda pada khususnya dalam meningkatkan pengawasan lurah dalam pelaksanaan administrasi di kantor kelurahan pelita kecamatan samarinda ilir.

Kerangka Dasar Teori

Pengawasan

Pengawasan pada hakekatnya merupakan tindakan membandingkan antara hasil dalam kenyataan (*dassein*) dengan hasil yang diinginkan (*das sollen*). Pelaksanaan suatu rencana atau program tanpa diiringi dengan suatu sistem pengawasan yang baik dan berkesinambungan, jelas akan mengakibatkan lambatnya atau bahkan tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan.

Menurut Siagian dalam Syafiie (1999:12), Pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Henry Fayol dalam Harahap (1996:282) mengatakan “pengawasan merupakan pemeriksaan apakah semua yang terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, instruksi yang dikeluarkan sesuai dengan prinsip yang ditetapkan”.

Menurut Terry dalam Muchsan (1992:37) Pengawasan adalah menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi apa yang telah dicapai,

mengevaluasi dan menerapkan tindakan korektif, jika perlu memastikan hasil yang sesuai dengan rencana.

Menurut Bohari (1992:3), pengertian yang sesungguhnya tentang pengawasan yaitu suatu upaya agar apa yang telah direncanakan sebelumnya diwujudkan dalam waktu yang telah ditentukan serta untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan dalam pelaksanaan tadi, sehingga berdasarkan pengamatan-pengamatan tersebut dapat diambil suatu tindakan untuk memperbaikinya, demi tercapainya wujud semula.

Menurut Nc. Farland dalam handyaningrat (1991:124), pengawasan adalah suatu proses dimana pimpinan mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, atau kebijaksanaan yang telah ditentukan.

Lurah

Lurah merupakan pimpinan dari kelurahan sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Seorang lurah berada dibawah dan bertanggung jawab kepada camat. Istilah lurah seringkali disebut dengan jabatan kepala desa. Memang, di daerah jawa pada umumnya, secara historis pemimpin dari sebuah desa dikenal dengan istilah Lurah. Namun dalam konteks Pemerintahan Indonesia, sebuah kelurahan dipimpin oleh Lurah, sedang desa dipimpin oleh Kepala Desa. Tentu saja keadaannya berbeda, karena Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertanggung jawab kepada Camat, sedang Kepala Desa bisa dijabati oleh siapa saja yang memenuhi syarat dan dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).

Menurut Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kota Samarinda Bab 1 Pasal 1 poin 14 menyebutkan bahwa Lurah adalah pimpinan penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah kerja Kelurahan dalam wilayah kerja Kecamatan dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Samarinda.

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 127 ayat 4, Lurah diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Camat dan pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dalam melaksanakan tugasnya Lurah memperoleh pelimpahan dari Bupati/Walikota.

Pemerintah (lurah) merupakan orang yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yang paling besar dalam kelurahan yang dipimpinnya, sehingga masyarakat yang ada di kelurahan itu harus menghargai dan menghormatinya

sesuai dengan tugas dan jabatan yang disandangnya. Dengan demikian ia pula harus mengingatkan kebutuhan-kebutuhan serta hak dan kewajiban warga masyarakat.

Tugas-tugas Lurah sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Kelurahan
- b. Pemberdayaan masyarakat
- c. Pelayanan masyarakat
- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum

Sedangkan fungsi Kepala Kelurahan atau Lurah adalah :

- a. Menggerakkan partisipasi masyarakat
- b. Melaksanakan koordinasi terhadap jalannya Pemerintahan Kelurahan
- c. Melaksanakan tugas dari Pemerintahan atasannya
- d. Melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya dalam bidang pembangunan dan kemasyarakatan
- e. Menjalankan tugas dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban

Adapun kedudukan Lurah atau Kepala Kelurahan adalah sebagai berikut :

1. Sebagai alat pemerintahan yang berada langsung dibawah Camat, dan didalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat
2. Tugas Kepala Kelurahan atau Lurah sebagai penyelenggara dan penanggung jawab utama dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, urusan Pemerintahan Umum dan Pembinaan Ketentraman serta Ketertiban.

Seorang Lurah harus menjadi panutan bagi bawahannya. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, seorang Lurah harus mempunyai kecakapan untuk bisa mempengaruhi orang yang dipimpinnya dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Administrasi

Menurut Siagian (2003:20) Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang berdasarkan atas rasionalitas tertentu dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu dengan berdaya guna.

Menurut Silalahi (2002:6) Administrasi adalah tata usaha yang mencakup setiap pengaturan yang rapid an sistematis serta penentuan fakta-fakta secara

tertulis dengan tujuan memperoleh pandangan yang menyeluruh serta hubungannya yang timbale balik antara satu fakta dengan fakta lainnya.

Menurut Widjaja (2002:1) mengemukakan bahwa istilah dan pengertian administrasi berasal dari bahasa latin yaitu “ad” dan “ministrate” yang berarti melayani, membantu atau memenuhi.

Definisi para ahli tentang administrasi ini sangat banyak sehingga tidak perlu lagi disajikan satu persatu karena pada prinsipnya mempunyai pengertian yang sama yaitu antara lain :

- a. kerjasama
- b. melibatkan banyak orang
- c. untuk mencapai tujuan bersama.

Administrasi memiliki unsur-unsur tertentu yaitu adanya sekelompok orang, yang dimaksudkan sekelompok orang adalah sekumpulan orang-orang paling sedikit dua orang dan paling banyak jumlahnya tidak terbatas. Orang-orang tersebut bekerja dalam hubungan yang bersifat formal dan hierarkis, adanya tujuan yang ingin dicapai, adanya tugas-tugas yang harus dilaksanakan dan tersedianya sarana dan prasarana tertentu.

Pelaksanaan Administrasi Umum di Kelurahan

Menurut Widjaja (2002:52) Pelaksanaan Administrasi Umum di kelurahan adalah sebagai berikut :

1. Buku Administrasi Umum yaitu keputusan desa, keputusan lurah, kekayaan desa, dan inventaris kelurahan, agenda, ekspedisi, aparat desa dan kelurahan. Dalam penyelenggaraan pemerintah kelurahan berkewajiban melakukan pencatatan data pada buku administrasi umum. Pengisian buku dipertanggung jawabkan pelaksanaannya pada sekretaris kelurahan.
2. Selain kepala kelurahan dan sekretaris ada beberapa bagian yang menjadi faktor pendukung dalam kegiatan/pelaksanaan administrasi dalam organisasi kelurahan tersebut yaitu :
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan
 - b. Kepala Seksi Trantib
 - c. Kepala Seksi Pembangunan
 - d. Kepala Seksi Kessos
 - e. Kepala Seksi Lingkungan Hidup

Semua kegiatan yang dilakukan dan direncanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan sebagai pedoman dan landasan kerja oleh Kepala Kelurahan beserta kepala seksi lainnya sebagai pelaksana administrasi yang sangat diperlukan

adanya pengawasan didalamnya bahkan setiap saat dilakukan evaluasi agar tercapainya pencapaian tujuan secara optimal.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam rangka penulisan ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan keadaan di lapangan dengan data yang diperoleh dari hasil penelitian.

Menurut Arikunto (2005:234) mengatakan bahwa penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala yang dikumpulkan di lapangan menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Selanjutnya menurut Sugiyono (2003 : 11) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain.

Lokasi Penelitian

lokasi penelitian terletak di Kantor Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir.

Fokus Penelitian

1. Pengawasan langsung
 - a. Inspeksi langsung
 - b. Observasi di tempat
 - c. Laporan di tempat
2. Pengawasan tidak langsung
 - a. Laporan tertulis
 - b. Laporan lisan
3. Faktor-faktor penghambat pengawasan
 - a. Sumber daya manusia
 - b. Fasilitas/sarana dan prasarana

Sumber Data

1. Data primer

2. Data sekunder :
 - a. Dokumen, profil, arsip, laporan, evaluasi
 - b. Buku ilmiah

Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian kepustakaan (*Library research*)
2. Penelitian lapangan (*Field work research*)
 - a. Observasi
 - b. Wawancara
 - c. Penelitian dokumentasi
 - d. Data dari internet

Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman :

1. Pengumpulan data
2. Penyederhanaan data (*Data Reduction*)
3. Penyajian data (*Data Display*)
4. Penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Hasil Penelitian

Pengawasan Langsung

1. Inspeksi Langsung

Pengawasan melalui inspeksi langsung yang dilakukan oleh Lurah dilakukan secara rutin setiap kegiatan pelaksanaan administrasi berlangsung, melalui monitoring atau peninjauan yang dilakukan setiap hari maka secara otomatis pelaksanaan administrasi umum di Kelurahan Pelita akan berjalan lancar dan apabila ditemukan hambatan-hambatan ataupun kesalahan-kesalahan maka akan segera diperbaiki dan diselesaikan.

2. Observasi di tempat

Observasi ditempat yang dilakukan oleh Lurah adalah pemeriksaan keseluruhan bidang yang ada di Kantor Kelurahan. Dimana observasi tersebut dilaksanakan pada waktu yang tidak ditentukan atau tanpa sepengetahuan dari aparat Kelurahan. Hasil penelitian, pengawasan lurah melalui observasi ditempat sudah cukup baik namun terkadang ada pihak masyarakat yang masih mengeluhkan karena proses kerja yang agak lamban penanganannya, misalnya saja masyarakat yang harus menunggu lama berkas yang dikerjakan pegawai kelurahan.

3. Laporan di tempat

Hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa laporan di tempat sangat penting dilakukan oleh para pegawai kantor kelurahan karena dengan adanya laporan di tempat, maka segala laporan yang penting yang memang harus disampaikan pada atasan akan berjalan dengan baik sebagaimana mestinya.

Pengawasan Tidak Langsung

1. Laporan tertulis

Laporan tertulis didalam pengawasan tidak langsung merupakan evaluasi hasil kerja bawahan berdasarkan laporan Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi sebagai bahan penyempurnaan kegiatan yang akan datang. Lurah melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan administrasi yang dilakukan untuk melihat dan menilai sejauh mana kegiatan dari pelaksanaan administrasi tersebut dilaksanakan dan jika terdapat kekurangan akan dijadikan sebagai bahan pembelajaran kedepannya yang berdasarkan laporan sekretaris.

Evaluasi dapat dihasilkan secara baik apabila didahului dengan perencanaan yang matang. Sebelum diadakannya evaluasi perlu dilakukan terlebih dahulu monitoring atau pemantauan. Pemantauan tersebut merupakan kegiatan pengukuran dan penilaian terhadap proses dan atau hasil kegiatan secara berkala dengan selang waktu tertentu, teratur dan berkelanjutan. Sedangkan evaluasi itu sendiri merupakan rencana sistematis dan usaha untuk mrngukur dan menilai suatu keadaan atau dalam hal ini kegiatan administrasi secara obyektif.

Dari beberapa hasil wawancara diatas maka penulis menyimpulkan bahwa laporan tertulis yang dilaksanakan oleh sekretaris lurah dan kepala kasi kepada lurah berjalan sudah cukup baik.

2. Laporan lisan

Laporan lisan itu disampaikan apabila terjadi suatu kendala atau permasalahan baik itu didalam lingkungan kantor kelurahan maupun dilingkungan masyarakat. Pengawasan yang dilakukan oleh Lurah agar masalah dapat teratasi dengan cara menindaklanjuti laporan tersebut dengan cara memberikan arahan dan bimbingan sebagai tindakan yang harus dilaksanakan oleh Lurah, yaitu memberikan solusi serta pemecahan masalah kepada pegawai kelurahan maupun masyarakat sehingga kerjasama dari pihak kelurahan maupun masyarakat diperlukan guna mencapai hasil yang maksimal dalam penyelenggaraan dan pelayanan administrasi kepada masyarakat.

Faktor-faktor Penghambat Pengawasan

1. Sumber Daya Manusia

Terbatasnya dan rendahnya sumber daya manusia yang dimiliki Kantor Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir adalah merupakan faktor internal yang pada umumnya tergolong rendah sehingga menjadi penghambat dalam meningkatkan pelaksanaan administrasi umum pada Kantor kelurahan Pelita.

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa pendidikan pegawai yang masih rendah dalam suatu organisasi khususnya instansi di Kelurahan merupakan kendala atau hambatan bagi pegawai untuk dapat bekerja secara maksimal dan hal ini berpengaruh pula terhadap pengawasan yang dilakukan Lurah karena hasil dan tujuan daripada pengawasan tersebut tidak bisa cepat diterima dengan baik oleh bawahan.

2. Fasilitas/Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana adalah merupakan seperangkat alat yang digunakan dalam suatu proses kegiatan baik alat tersebut peralatan pembantu maupun peralatan utama yang keduanya berfungsi untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat dikatakan bahwa fasilitas/sarana dan prasarana berpengaruh terhadap pengawasan yang dilakukan oleh lurah, sehingga ini menjadi salah satu faktor penghambat pengawasan tersebut.

Penutup

Kesimpulan

1. Diketahui bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Lurah di Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir antara lain melalui pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.
 - a. Pengawasan langsung yang dilakukan oleh Lurah sudah berjalan cukup baik. Inspeksi dilakukan setiap kegiatan administrasi administrasi berlangsung, observasi ditempat cukup baik walaupun masih ada pihak masyarakat yang mengeluhkan, laporan ditempat sangat penting dilakukan untuk melihat hasil kinerja dan mengetahui kegiatan-kegiatan para pegawai dalam proses pelaksanaan kegiatan administrasi umum.
 - b. Pengawasan tidak langsung yang berbentuk laporan tertulis dan laporan lisan yang disampaikan oleh Sekretaris Lurah atau Kepala Kasi kepada Lurah sudah cukup baik dimana bertujuan untuk membantu Lurah dalam melakukan evaluasi mengenai pelaksanaan kegiatan administrasi umum di Kelurahan yang berkaitan dengan peningkatan mutu pelayanan.

2. Adapun faktor penghambat dalam melakukan pengawasan dalam pelaksanaan administrasi umum di Kantor Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir.

- a. Sumber Daya Manusia

Faktor yang menghambat pengawasan yaitu sumber daya manusia bahwa jenjang pendidikan yang dimiliki oleh para pegawai Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir masih rendah, karena jenjang pendidikan yang rendah itu para pegawai tidak mampu mencerna dan mengolah arah-arahan yang diberikan oleh atasan dengan baik yang mengakibatkan pengawasan yang telah dilakukan menjadi tidak efektif dan efisien.

- b. Fasilitas/sarana dan prasarana

Faktor yang menghambat pengawasan yaitu mengenai fasilitas/sarana dan prasarana, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana yang optimal bagi masyarakat demi kelangsungan pelaksanaan administrasi serta pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat.

Saran

Adapun dalam skripsi ini, peneliti akan menyampaikan beberapa saran-saran yang dapat berguna dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan kepada semua pihak aparatur pemerintah khususnya pemerintahan kelurahan yaitu dalam hal ini Lurah sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis sebagai berikut :

1. Penulis menyarankan kepada Lurah harus lebih sering melakukan evaluasi atau pengawasan terhadap pegawainya, semakin sering diadakannya inspeksi langsung, maka semakin baik pula kinerja dari aparat Kelurahan dan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran diri aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang telah diberikan.
2. Penulis menyarankan untuk aparatur yang ada di Kantor kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai pelayan masyarakat lebih dimaksimalkan lagi, sehingga apa yang diinginkan oleh semua pihak dapat tercapai dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan.
3. Penulis menyarankan agar menetapkan standar kualitas pendidikan pegawai dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat menjadi maksimal dan dengan begitu pengawasan dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan.
4. Penulis menyarankan agar meningkatkan sarana dan prasarana di Kantor kelurahan karena apabila sarana dan prasarana sudah memadai dan cukup nyaman dapat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan administrasi dan pelayanan yang diberikan dapat berjalan dengan maksimal.

Daftar Pustaka

- Arikunto, 2005. *Suharsini. Prosedur Penelitian (Edisi Revisi) : Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Bohari, 2002. *Pengawasan Keuangan Negara*. Jakarta : CV Rajawali.
- Burhanuddin, 2000. *Analisis Administrasi Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan* .Jakarta : Bumi Aksara.
- Gunur, Alex, 2003. *Kerangka-kerangka Pokok Manajemen*. Jakarta.
- Handayaniingrat, Soewarno. 2005. *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung
- K, Soekarno, 1998. *Garis-garis Manajemen*. Jakarta : Mlswar
- Milles, B.Mathew dan A. Michael Huberman, 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta VI Press.
- Moekijat, 2000. *Fungsi – fungsi Manajemen*. Bandung : Mandar Maju.
- Moleong, M.A, Dr. Lexy J, 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarta.
- Muchsan, 2004. *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Yogyakarta : Liberty.
- Nawawi, Hadari, 2000. *Pengawasan Di Lingkungan Aparatur Pemerintahan*. Jakarta : Erlangga.
- Sarwoto. 1994, *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*. Jakarta:Ghalia Indonesia.
- Silalahi, Ulbert, 2002. *Studi tentang Ilmu Administrasi (konsep, teori, dan dimensi)*.Bandung : CV Sinar Baru.
- Siagian, S.P., 2000. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Siagian, S.P, 2003. *Filsafat Administrasi Edisi Revisi*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Sugiono, 2002. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta.
- Sujamto, 2000. *Aspek-aspek Pengawasan Di Indonesia*. Jakata : Sinar Grafika.
- Syafiie, Inu Kencana. Tandjung, Djamaludin. Modeong, Supardan, 2000. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Syafiie, Inu Kencana, 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)* Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Widjaja, A.W, Rahman, A, 2002. *Fikry. Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*.Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Thoha, Miftah, 2005. *Ilmu administrasi Negara*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Sumber Internet :

<http://id.wikipedia.org/wiki/Lurah> (diakses 25 Maret 2013)